

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang Sertifikasi Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset telah dilaksanakan dengan cukup baik tetapi masih belum optimal melalui pendekatan isi kebijakan dan konteks kebijakan. Berjalan sesuai dengan rencana dalam mencapai target sertifikasi aset.
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang Sertifikasi Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung adalah bukti kepemilikan lahan, terbitnya sertifikat yang cenderung lambat dari BPN dikarenakan keduanya mempunyai target berbeda dalam sertifikasi aset, jumlah lahan aset yang begitu luas, catatan tidak sesuai dengan fisik, adanya claim dari pihak lain yang dapat menyebabkan kasus baru. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang Sertifikasi Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung adalah adanya PTSL yang mempercepat sertifikasi aset,

memiliki data administrasi yang lengkap, SDM yang kapabel dan anggaran yang cukup memadai.

3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung untuk menyempurnakan pengelolaan barang milik daerah tentang sertifikasi aset di Kota Bandung yaitu penyusunan regulasi, crosscheck data-data yang belum lengkap, sosialisai ke perangkat daerah, mencari data, memanfaatkan adanya daya dukung dari KPK, pengembalian batas dan penyusunan SOP. Upaya dilakukan dengan memaksimalkan data yang lengkap dan SDM yang mumpuni.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Teoritis**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel lain yang berkaitan, sehingga dapat diketahui variabel - variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan aset tentang sertifikasi aset.

### **5.1.2 Saran Praktis**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki saran praktis mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik

Daerah tentang Sertifikasi Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, yaitu :

1. Penyelarasan antara dokumen-dokumen dengan fakta dilapangan lebih ditingkatkan.
2. Koordinasi yang intens dengan Badan Pertanahan Nasional mengenai target sertifikasi aset daerah.
3. Lebih banyak lagi SDM yang berpengalaman mengetahui kondisi pertanahan supaya meminimalisir konflik.
4. Mempunyai prioritas mengenai bidang-bidang aset daerah yang akan disertifikatkan.
5. Dapat mengembangkan inovasi mengenai pengelolaan aset supaya implementasi dapat menghasilkan ketercapaian sesuai dengan yang direncanakan.